

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR

Oleh:
I Komang Putra Budi Kurniawan
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

A
B
S
T
R
A
K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 11 Denpasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan studi kasus yang melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI di SMP Negeri 11 Denpasar belum maksimal, terhambat oleh faktor struktur birokrasi, sumber daya manusia yang kurang kompeten, disposisi yang mengarah pada penolakan atau sikap acuh, serta distorsi dalam komunikasi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana, minimnya pengetahuan guru tentang manajemen sekolah, dan rendahnya pemahaman pendidik mengenai esensi pendidikan turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyarankan agar peningkatan sarana dan prasarana, serta kerjasama tim dalam pelaksanaan kegiatan, dapat membantu memperbaiki kualitas pendidikan di SMP Negeri 11 Denpasar.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Sistem Penjamin Mutu Internal, kualitas pendidikan.

This study aims to analyze the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) policy at SMP Negeri 11 Denpasar and the factors influencing the success of the policy. The method used is a descriptive approach with a case study involving observation, interviews, and document study to collect data. The results show that the implementation of SPMI at SMP Negeri 11 Denpasar has not been maximized, hindered by factors such as bureaucratic structure, insufficiently competent human resources, disposition leading to rejection or indifference, and communication distortions. Additionally, the lack of facilities and infrastructure, limited knowledge of school management among teachers, and low understanding of the essence of education among educators also impact the policy implementation. The study suggests that enhancing facilities and infrastructure, as well as strengthening team collaboration in implementing activities, can help improve the quality of education at SMP Negeri 11 Denpasar.

Keywords: policy implementation, Internal Quality Assurance System, education quality.

A
B
S
T
R
A
C
T

A. PENDAHULUAN

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjamin mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjamin mutu pendidikan yang terdiri dari sistem penjamin mutu internal (SPMI) dan sistem penjamin mutu eksternal (SPME).

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Lembaga pendidikan seharusnya menetapkan standar mutu yang tidak hanya dinyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi, tetapi juga harus dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas bagaimana mutu di lembaga pendidikan itu direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang jelas (Sri Uchiawati, 2014: 52-53). Dalam proses penetapan mutu lembaga pendidikan perlu melihat faktor-faktor peningkatan mutu dari banyak sisi, dan tidak hanya puas terhadap hasil dari proses pengakuan terakreditasi saja melainkan memiliki motivasi tinggi terhadap peningkatan mutu atau melampaui mutu dari standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 91 berisi pernyataan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjamin mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP (Suharsaputra, 2013: 383-384). Dengan pemenuhan seluruh standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, maka tingkat pendidikan di Indonesia akan semakin bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing.

SMP Negeri 11 Denpasar merupakan salah satu pendidikan yang ikut dalam mencerdaskan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di SMP merupakan pendidikan anak yang berusia 12 sampai dengan 15 tahun sebagai pendidikan di tingkat menengah yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa SMP ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila sekolah menengah disebut sebagai pusat pendidikan. Bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran.

Faktanya di lapangan, mutu pendidikan terutama di SMP Negeri 11 Denpasar belum maksi

mal pada standar Sarana dan prasarana karena sampai saat ini fasilitas-fasilitas yang mesti dipenuhi untuk tingkat SMP antara lain adalah ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), ruang kepala sekolah, ruang guru. Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan masih ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Banyak permasalahan yang muncul terkait mutu pendidikan di SMP Negeri 11 Denpasar seperti lulusan yang kurang kompeten, kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar proses, sarana dan prasarana, pendidikan yang kurang memadai, tenaga pendidik yang kompetensi pedagogik dan profesionalnya rendah serta mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, tenaga kependidikan yang kurang menguasai administrasi dan manajemen, kurangnya peran serta masyarakat baik orang tua peserta didik, dunia usaha, dan industri dalam pembiayaan pendidikan karena masih rendahnya kepedulian terhadap bidang pendidikan atau karena sekolah sendiri belum secara maksimal menggali potensi sumber daya finansial dari masyarakat, dan masih banyak hal lainnya lagi. Hal ini dikarenakan masih banyak sekolah yang belum maksimal bahkan belum sama sekali melakukan upaya untuk penjaminan mutu pendidikan.

Peningkatan penjamin mutu perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, mulai dari pusat sampai ke satuan pendidikan. Dalam catatan penting hasil audiensi Technical Assistance for Education System Strengthening (TASS) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) disebutkan bahwa arah penjamin mutu pendidikan ke depan difokuskan pada tiga hal yaitu: 1) Kualitas proses pembelajaran, 2) Kualitas manajemen sekolah, 3) Kualitas guru.

Dari hasil survei tersebut, peneliti melihat adanya kesenjangan antara teori dan realita yang terjadi di lapangan yaitu mutu peserta didik di SMP Negeri 11 Denpasar masih rendah bahkan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Perlu adanya perbaikan sistem pendidikan secara holistik terhadap unsur-unsur penting pendukung peningkatan mutu pendidikan yang dapat menghasilkan percepatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 11 Denpasar. Dan usaha peningkatan mutu pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, bahkan yang paling berperan adalah satuan pendidikan itu sendiri. Sejauh mana lembaga pendidikan dapat mengelola secara maksimal seluruh sumber daya yang dimiliki, bersinergi dengan lingkungan serta memanfaatkan potensi kekhasan daerah dan bekerjasama dengan masyarakat baik dunia usaha maupun industri, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap sejauh mana mutu pendidikan dapat dicapai.

Sebuah lembaga pendidikan baik penyelenggara maupun pelaksana pendidikan harus melakukan usaha yang maksimal untuk dapat memberikan pelayanan dan penjamin mutu agar lembaga pendidikan dapat memenuhi SNP atau bahkan melampaui SNP sesuai indikator mutu yang

sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan lembaga pendidikan beserta semua komponennya yang memiliki budaya mutu sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi pada dimensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, maupun keterampilan. Keempat potensi kompetensi ini ditegaskan dan dirumuskan oleh BSNP berupa profil lulusan dengan mengacu pada tujuan pendidikan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Profil lulusan tersebut adalah: 1) Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, 2) Cinta tanah air, bangsa dan negara, 3) Demokratis dan bertanggung jawab, 4) Cakap dan berilmu, 5) Kritis, kreatif, inovatif dan produktif, 6) Sehat lahir dan batin, dan 7) Mampu menjadi warga dunia.

Lulusan yang bermutu hanya akan dapat diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu, proses pembelajaran yang bermutu hanya akan dapat disajikan oleh tenaga pendidik yang bermutu, tenaga pendidik yang bermutu adalah produk dari manajemen sekolah yang bermutu. Maka penjaminan mutu mutlak harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Rumusan Masalah

1. Mengapa implementasi kebijakan sistem penjamin mutu pendidikan di SMP Negeri 11 Denpasar belum maksimal?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem penjamin mutu internal di SMP Negeri 11 Denpasar?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus, bertujuan untuk mempelajari secara mendalam implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 11 Denpasar. Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan siklus SPMI, yang kemudian digunakan untuk menyusun instrumen pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian adalah keberhasilan dalam mengimplementasikan manajemen mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian berlangsung selama enam bulan di SMP Negeri 11 Denpasar, dengan alasan pemilihan sekolah ini karena masalah implementasi kebijakan SPMI yang belum maksimal. Penelitian ini mengutamakan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan terhadap stakeholder yang terlibat. Data sekunder berupa dokumen terkait kebijakan dan rencana strategis pendidikan juga dikumpulkan untuk mendukung penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memastikan data yang representatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, didukung oleh pedoman wawancara dan alat perekam untuk memperoleh data yang valid dan mendalam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi Menurut Ripley dan Franklin di dalam buku Budi Winarno(2007:145), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai actor, khususnya para birokrat, yang dimaksud membuat program berjalan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal Di SMP Negeri 11 Denpasar

Untuk mengukur belum maksimalnya implementasi kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 11 Denpasar, digunakan empat indikator: struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi.

Implementasi kebijakan SPMI di SMP Negeri 11 Denpasar, dilihat dari indikator struktur birokrasi, menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam fragmentasi birokrasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik dapat menghambat efektivitas kebijakan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif, hal ini akan mengganggu pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan wawancara, ditemukan masalah terkait kegagalan implementasi yang disebabkan oleh staf yang tidak cukup memadai atau tidak kompeten dalam bidangnya. Staf dengan keahlian yang tepat sangat diperlukan untuk suksesnya implementasi kebijakan.

Indikator disposisi menunjukkan adanya konflik dan penolakan dari agen pelaksana yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pelaksana kebijakan menunjukkan sikap acuh tak acuh atau menunda pekerjaan, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Indikator komunikasi mengungkapkan masalah dalam penyampaian informasi, dengan adanya distorsi akibat panjangnya rantai informasi dalam birokrasi, yang dapat menyebabkan bias informasi dan kesalahan pemahaman.

Penilaian terhadap implementasi kebijakan SPMI menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan belum maksimal, termasuk kurangnya sarana dan prasarana, minimnya pengetahuan guru tentang manajemen sekolah, dan rendahnya pemahaman pendidik mengenai

esensi pendidikan yang seharusnya dilakukan. Beberapa tenaga pendidik juga tidak serius dalam menjalankan tugasnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem penjamin mutu internal di SMP Negeri 11 Denpasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan program, partisipasi seluruh pelaksana pemerintahan, dan faktor yang tidak terkendali. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan SPMI, peneliti menyarankan agar pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana, serta memperkuat kerjasama tim dalam pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai dengan memperbaiki aspek seperti kelulusan, proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, sarana dan prasarana, serta penilaian dan pembiayaan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diungkapkan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 11 Denpasar belum berjalan maksimal, sebagaimana terlihat dari empat indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini: struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Hambatan dalam struktur birokrasi, seperti fragmentasi yang mengganggu efektivitas kebijakan, menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Staf yang tidak memadai atau kurang kompeten dalam bidangnya juga turut menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPMI sangat bergantung pada ketersediaan staf dengan keahlian yang tepat. Indikator disposisi menunjukkan adanya konflik dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan, yang menciptakan sikap acuh tak acuh dan penundaan pekerjaan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan. Selain itu, masalah dalam komunikasi juga ditemukan, terutama terkait distorsi informasi yang disebabkan oleh panjangnya rantai birokrasi. Hal ini menyebabkan bias informasi dan kesalahan dalam pemahaman kebijakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPMI di SMP Negeri 11 Denpasar melibatkan banyak aktor, kejelasan tujuan, perkembangan program, serta partisipasi seluruh pelaksana pemerintahan. Kurangnya sarana dan prasarana, minimnya pengetahuan guru tentang manajemen sekolah, serta rendahnya pemahaman pendidik mengenai esensi pendidikan menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa tenaga pendidik juga kurang serius dalam melaksanakan tugasnya, yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan SPMI, disarankan agar pemerintah memfasilitasi pening

katan sarana dan prasarana, serta memperkuat kerjasama tim di antara seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, perbaikan dalam aspek kelulusan, proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, sarana dan prasarana, penilaian, serta pembiayaan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 11 Denpasar.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, W. (2020). *Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis*. Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1.
- Bekasi, D. P. (2015). *Pengertian dan Tujuan Pendidikan di Sekolah Dasar*.
- Nurochim, N., & Ngaisah, S. (2021). *Analisis Isi Sikap Sosial Dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Al Hikmah: Journal of Education, 2(1), 37-52.
- Howay, A., Lerebulan, M., Utomo, S., & Mulyono, G. (2020). *Pemenuhan mutu standar penilaian: buku 2D panduan sistem penjaminan mutu internal menuju sekolah standar nasional pendidikan*.
- Juharni, M. S. (2017). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) (Vol. 1)*. SAH MEDIA.
- Surya dan Sam M. Chan .2010. *mutu pendidikan merupakan kemampuan suatu lembaga pendidikan dalam memanajemen, mengelola, dan mendayagunakan sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik*.
- Putri, Y. L., & Utomo, H. (2017). *Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan sebagai variabel intervening (Studi persepsi pada pelanggan dian comp ambarawa)*. Among Makarti, 10(1).
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). *Implementasi sistem penjaminan mutu internal Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 4(1), 17-32.
- Muhammad Mauluddin dan Amy Yayuk Sri Rahayu, 2013 *dalam jurnal administrasi perkantoran*
- Ekawati, F. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPIT*. Jurnal ISEMA: Islamic Educational Management, 3(2), 118-139.
- Jonnedi, J., Ginting, R., & Hendra, Y. (2020). *Strategi Komunikasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal*. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal), 6(1), 76-85.
- Mala Nuryahya, E. (2018). *Manajemen penjaminan mutu internal tenaga pendidik dan kependidikan: studi kasus di SMP Al Hikmah Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)*.
- James AO'Brien dan George M Marakas dalam Husda & Wangdra (2016) "*Sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi apapun dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data*

- Nasution, A. G. J. (2020). *Metodologi Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Bancin, A. (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 9(1), 1-12.
- SAFITRI, I. A., Susilowati, R., & Tamsyah, I. (2022). *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PEREMPUAN DI MALAYSIA SELAMA PANDEMI COVID-19* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- RUBIANTI, D. R. (2020). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi di Desa Sokaraja Kidul* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Witaradya, K. (2010). *Implementasi kebijakan model CG Edward III*. Diambil kembali dari Kertya Witaradya: Government Consultan: <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-cg-edward>.
- Prastowo, A. (2018). *Sumber belajar dan pusat sumber belajar: Teori dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Kencana.
- Saira, S. (2020). *Implementasi Perda Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Studi di Pasar Jampue) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). *Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 19(3), 781-796.
- Putra, I. W. G. A., Yudana, I. M., & Suarni, N. K. (2014). *Efektifitas Pelaksanaan Standar Proses (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 65 Tahun 2013) Dalam Pembelajaran Pkn Pada Siswa Tingkat Pertama SMP Negeri Se-kabupaten Badung*. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 5(1).
- Utomo, B. T. (2018). *COMPUTER BASED TEST FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SUBANG*. In GLOBAL (Vol. 5, No. 2).
- Sinaga, S. M., Hamdi, M., Wasistiono, S., & Lukman, S. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS BUS RAPID TRANSIT (BRT) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI DKI JAKARTA*. PAPTUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 2(3), 203-220.
- Asbeni, E. (2013). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi tentang Standar Operasional Prosedur) di Politeknik Negeri Sambas*. JPMIS.
- Samudra, A. A., & Sumada, I. M. (2021). *SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STUDI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH DASAR DI JAKARTA*. Perspektif, 1(1), 11-21.
- Gampu, S. (2021). *PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN TUMUMPA*. Jurnal Akrab Juara, 6(4), 102-109.